

Evaluasi Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada BKAD Kota Palangka Raya

Aditya Rahmadani^{a*}, Achmad Syamsudin^a, Helma Prasetya Sanjaya^a

^a Universitas Palangka Raya, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 09-03-2026

Revised : 01-04-2026

Accepted : 05-04-2026

Keywords: BKAD, Policy Implementation, Regional Financial Management, SIPD RI

Kata Kunci: BKAD, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Keuangan Daerah, SIPD RI

Corresponding Author:

adit05rdani@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) in regional financial management at the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Palangka Raya City. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The analysis was conducted using Edward III's theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that SIPD RI has supported the processes of planning, budgeting, administration, reporting, and regional asset management. However, its implementation still faces several obstacles, including delays in information delivery, limited employee competence, network disruptions, server errors, and dependence on certain operators. Therefore, SIPD RI has been implemented fairly well, but it still requires strengthening in terms of training, infrastructure, and technical coordination.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan daerah pada BKAD Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD RI telah mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pengelolaan barang milik daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterlambatan informasi, keterbatasan kompetensi pegawai, gangguan jaringan, server error, serta ketergantungan pada operator tertentu. Dengan demikian, SIPD RI telah berjalan cukup baik, tetapi masih membutuhkan penguatan pelatihan, infrastruktur, dan

koordinasi teknis.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan sistem informasi menjadi instrumen penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari upaya integrasi data dan digitalisasi administrasi pemerintahan. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terpusat dan berbasis teknologi. Implementasi sistem ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya pengelolaan data secara terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Saputra et al., 2023).

Secara empiris, SIPD memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung proses perencanaan dan pelaporan yang lebih sistematis (Hasanah et al., 2025). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas sistem, serta permasalahan teknis seperti ketidakstabilan jaringan dan server (Maulana, 2025; Saputra et al., 2023). Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara tujuan penerapan SIPD dengan kondisi implementasinya di lapangan. Beberapa perangkat daerah belum mampu memanfaatkan sistem secara maksimal, sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal (Septiani & Isnawaty, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap implementasi SIPD, khususnya pada instansi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian

deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, serta lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Waktu penelitian dilaksanakan pada 15-28 april 2026.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam penggunaan SIPD RI. Menurut Sugiyono (2022), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan keuangan daerah, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Data ini digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat data primer.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penggunaan SIPD RI (Sugiyono, 2022).

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- Pejabat atau kepala bidang di BKAD
- Operator atau admin SIPD RI
- Staf pengelola keuangan daerah

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari

informan mengenai implementasi SIPD RI, efektivitas sistem, serta kendala yang dihadapi. Sugiyono (2022) menyatakan bahwa wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari responden.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas penggunaan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah. Observasi digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap terkait perilaku dan proses yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan SIPD RI sebagai bahan pendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi:

- Reduksi Data

Proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dengan penelitian.

- Penyajian Data (*Data Display*)

Penyusunan data dalam bentuk narasi agar mudah dipahami dan dianalisis.

- Penarikan Kesimpulan

Proses penafsiran data untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Menurut Sugiyono (2022), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data mencapai titik jenuh.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono (2022) menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data.

Adapun triangulasi yang digunakan meliputi:

- Triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari berbagai informan
- Triangulasi teknik, dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memastikan data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya.

Kerangka Analisis

Analisis implementasi SIPD RI dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi empat indikator utama, yaitu:

- Komunikasi
- Sumber daya
- Disposisi
- Struktur birokrasi

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis keberhasilan implementasi SIPD RI di BKAD Kota Palangka Raya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau SIPD RI pada BKAD Kota Palangkaraya menunjukkan bahwa sistem ini telah menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara, SIPD RI digunakan dalam tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, serta pengelolaan barang milik daerah. Salah satu informan menyampaikan bahwa “SIPD RI telah menjadi sistem utama dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SIPD RI tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi administrasi, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut sejalan dengan dokumen Kemendagri yang menjelaskan bahwa SIPD RI merupakan generasi baru dari SIPD yang dikembangkan dengan arsitektur *microservices*. SIPD lama berbasis monolitik, sedangkan SIPD RI diarahkan sebagai aplikasi yang lebih terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan daerah. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa SIPD RI digunakan untuk perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2024–2025, serta penatausahaan tahun anggaran 2024.

Dalam penelitian ini, hasil implementasi SIPD RI dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan SIPD RI di BKAD Kota Palangkaraya telah berjalan dan kendala apa saja yang masih ditemukan dalam praktiknya.

Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi SIPD RI di BKAD Kota Palangkaraya sudah berjalan cukup baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi terkait penggunaan SIPD RI disampaikan melalui berbagai media, seperti surat edaran, rapat, grup WhatsApp, sosialisasi, bimbingan teknis, Zoom, dan YouTube. Informan

menyampaikan bahwa “informasi terkait penggunaan SIPD biasanya disampaikan melalui grup WhatsApp SIPD bersama pihak pusat,” terutama apabila terdapat perubahan sistem, perbaikan aplikasi, atau informasi teknis lainnya. Media komunikasi tersebut dinilai membantu pegawai memperoleh informasi secara cepat dan praktis. Meskipun demikian, komunikasi belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kendala berupa miskomunikasi, perbedaan akun, kesulitan menghubungi SOPD tertentu, serta keterlambatan informasi ketika terjadi gangguan sistem. Informan juga menjelaskan bahwa sosialisasi dan pelatihan memang pernah dilakukan, namun komunikasi masih perlu diperkuat agar informasi diterima secara merata dan tepat waktu oleh seluruh pengguna.

Temuan ini selaras dengan penelitian Saputra, Kusuma, dan Utomo (2025) yang menemukan bahwa sosialisasi SIPD secara umum telah berjalan efektif dalam menyampaikan informasi kebijakan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam konteks teknis penggunaan aplikasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kendala komunikasi sering muncul pada aspek kejelasan teknis, khususnya pemahaman terhadap fitur-fitur dalam aplikasi SIPD. Dengan demikian, komunikasi dalam implementasi SIPD RI dapat dikatakan telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan. Komunikasi tidak cukup hanya berupa penyampaian kebijakan bahwa SIPD RI wajib digunakan, melainkan juga harus mencakup pendampingan teknis, pembaruan informasi secara berkala, dan penyamaan pemahaman antarpegawai maupun antarperangkat daerah.

Sumber Daya

Pada aspek sumber daya, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD RI di BKAD Kota Palangkaraya telah didukung oleh pegawai, perangkat komputer, dan sarana kerja yang cukup memadai. Salah satu informan menyampaikan bahwa sekitar 80% pegawai telah menguasai penggunaan SIPD, sedangkan jumlah pegawai yang menangani SIPD dinilai mencukupi. Informan lain juga menyebutkan bahwa kemampuan pegawai dalam mengoperasikan SIPD sudah mumpuni dan komputer yang digunakan dalam kondisi baik. Namun, sumber daya manusia belum sepenuhnya merata. Operator inti umumnya telah memahami penggunaan SIPD RI, tetapi kemampuan pegawai lain masih berbeda-beda. Akibatnya, pekerjaan tertentu masih bergantung pada beberapa pegawai yang lebih menguasai sistem. Selain itu, kendala teknis seperti jaringan lambat, server error, timeout, logout otomatis, maintenance, bug, double catat, dan human error masih sering terjadi. Salah satu informan menyampaikan bahwa kendala teknis dari sistem pusat biasanya diselesaikan melalui pelaporan ke Pusdatin Kemendagri, baik melalui helpdesk maupun koordinasi langsung.

Temuan tersebut memperkuat penelitian Aini, Nurlitasari, dan Pamastutiningtyas (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas SIPD RI sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kemampuan teknis, literasi digital, pemahaman regulasi, dan

dukungan organisasi terhadap operator sistem. SIPD RI dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi manfaat tersebut hanya dapat dicapai jika didukung oleh SDM yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan transformasi digital. Kendala sumber daya juga ditemukan dalam penelitian Tumija dan Erlambang (2023) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran telah berjalan, tetapi masih menghadapi hambatan berupa SDM yang belum mampu menggunakan SIPD secara keseluruhan, aplikasi yang kurang fleksibel, server down, jaringan kurang stabil, kurangnya koordinasi antar-OPD, belum adanya SOP, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Penelitian Septiani dan Isnawaty (2025) juga menunjukkan bahwa efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah masih terhambat oleh kesalahan input manual, keterbatasan fitur, ketidakstabilan server, dan kurangnya integrasi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kesiapan sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi SIPD RI. Dengan demikian, sumber daya dalam implementasi SIPD RI di BKAD Kota Palangkaraya dapat dikatakan cukup mendukung, tetapi belum sepenuhnya optimal. Ketersediaan pegawai dan sarana kerja sudah memadai, namun pemerataan kompetensi, stabilitas jaringan, keandalan server, serta dukungan teknis dari pusat masih perlu diperkuat.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap SIPD RI menunjukkan kecenderungan positif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai menerima penggunaan SIPD RI karena sistem ini membantu dan mempermudah pekerjaan. Salah satu informan menyatakan bahwa SIPD membuat pekerjaan menjadi lebih otomatis dan mengurangi proses manual. Informan lain juga menyampaikan bahwa pegawai memberikan tanggapan baik terhadap penerapan SIPD karena sistem ini mendukung pekerjaan administrasi keuangan daerah. Dukungan pimpinan juga menjadi faktor penting dalam implementasi SIPD RI. Informan menyampaikan bahwa pimpinan mendukung penggunaan SIPD karena sistem ini telah menjadi poros penting dalam lingkungan pemerintahan. Selain itu, pegawai juga berusaha menjalankan sistem sesuai prosedur karena penggunaan yang tidak sesuai prosedur dapat menjadi temuan dalam pemeriksaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2025) yang menunjukkan bahwa dukungan dan komitmen implementor maupun kelompok sasaran menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi SIPD. Dalam penelitian tersebut, pelaksana di daerah menunjukkan kemauan untuk mengikuti arahan, menjalankan proses perencanaan dan penganggaran melalui SIPD, serta menyiapkan sumber daya manusia dan perangkat yang diperlukan. Penelitian Rezkiaty, Alam, dan Tenriwaru (2024) juga menunjukkan bahwa implementasi SIPD dapat berjalan optimal apabila didukung oleh kerja sama dan

komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. SIPD dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses informasi, dan kecepatan pengambilan keputusan, meskipun masih ditemukan kendala teknis di beberapa daerah. Dengan demikian, disposisi pelaksana di BKAD Kota Palangkaraya dapat dikatakan mendukung implementasi SIPD RI. Pegawai tidak menunjukkan penolakan terhadap sistem, tetapi justru menerima SIPD RI sebagai alat kerja yang membantu proses administrasi. Namun, sikap positif tersebut tetap perlu didukung oleh pelatihan, stabilitas sistem, serta pendampingan teknis agar penerimaan pegawai dapat berdampak langsung pada efektivitas implementasi.

Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi dalam implementasi SIPD RI di BKAD Kota Palangkaraya telah didukung oleh SOP, pembagian tugas, alur kerja, dan mekanisme pengawasan. Informan menyampaikan bahwa penggunaan SIPD telah memiliki panduan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing, mulai dari admin, operator SKPD, hingga pejabat struktural yang memiliki kewenangan menyetujui dokumen. Dalam konteks SIPD RI, tahapan perencanaan menjadi leading sector BAPPERIDA, sedangkan penganggaran, penatausahaan, akuntansi pelaporan, dan barang milik daerah menjadi leading sector BKAD melalui Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD RI melibatkan pembagian peran yang cukup kompleks, sehingga koordinasi antarbidang dan antarperangkat daerah menjadi sangat penting.

Meskipun struktur birokrasi telah tersedia, masih ditemukan beberapa kendala. Tidak semua pegawai memahami alur kerja SIPD RI secara menyeluruh, terutama pada tahapan revisi, penguncian data, koreksi, atau perubahan fitur setelah pembaruan aplikasi. Selain itu, masih terdapat ketergantungan pada individu tertentu dan belum semua unit memiliki operator cadangan yang kompeten. Temuan ini sesuai dengan penelitian Saputra et al. (2025) yang menjelaskan bahwa struktur organisasi dalam implementasi SIPD berfungsi untuk mempermudah koordinasi dan pembagian tugas. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat menghambat koordinasi, sehingga pembagian tugas dan mekanisme kerja harus disusun secara jelas.

Penelitian Any, Sy, dan Suryani (2025) di Provinsi Jambi juga menemukan bahwa keterlambatan OPD dalam melakukan input data menjadi salah satu hambatan implementasi SIPD. Hambatan tersebut berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman pengguna, dan rendahnya kapasitas SDM di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, struktur birokrasi dalam implementasi SIPD RI di BKAD Kota Palangkaraya sudah cukup mendukung, tetapi masih

membutuhkan penguatan koordinasi, penyederhanaan panduan teknis, pemerataan pemahaman alur kerja, dan penyediaan operator cadangan agar pelaksanaan sistem tidak bergantung pada individu tertentu.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SIPD RI

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung implementasi SIPD RI di BKAD Kota Palangkaraya meliputi adanya regulasi dan panduan dari Kementerian Dalam Negeri, dukungan pimpinan, kemampuan sebagian besar operator, tersedianya sarana kerja, serta adanya SOP dan mekanisme pengawasan. SIPD RI juga membantu menertibkan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan dokumen Kemendagri yang menyebutkan bahwa SIPD memiliki sejumlah kelebihan, seperti data yang terintegrasi, terdokumentasi melalui jejak digital, sesuai regulasi terbaru, transparan, aman, berbasis *microservices*, serta terintegrasi dengan aplikasi kementerian/lembaga. Selain itu, penelitian Hasanah, Adelia, Musyrifah, dan Rohmi (2025) menunjukkan bahwa SIPD berperan dalam membantu proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara lebih sistematis dan terintegrasi. SIPD juga berkontribusi dalam pengelolaan aset daerah melalui pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset secara lebih akurat.

Namun, implementasi SIPD RI juga masih menghadapi hambatan. Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi jaringan internet yang belum stabil, gangguan sistem pusat, *maintenance*, *bug*, *timeout*, *logout* otomatis, *human error*, *double catat*, belum meratanya kemampuan pegawai, serta masih adanya ketergantungan pada operator tertentu. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan SIPD RI tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh kualitas sistem, kesiapan SDM, dan efektivitas koordinasi antarunit. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam penelitian Hasanah dan Djasuli (2025) di Kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa penerapan SIPD belum terlaksana secara optimal karena kualitas sistem yang masih kurang dan waktu bimbingan teknis yang terbatas.

Dengan demikian, implementasi SIPD RI di BKAD Kota Palangkaraya menunjukkan perkembangan positif, tetapi masih membutuhkan optimalisasi. Penguatan perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kapasitas operator, penyempurnaan fitur, stabilitas jaringan dan server, peningkatan layanan *helpdesk*, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada BKAD Kota Palangkaraya secara umum telah berjalan cukup baik dan telah menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan

keuangan daerah. SIPD RI digunakan dalam tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi pelaporan, serta pengelolaan barang milik daerah. Sistem ini membantu proses administrasi keuangan menjadi lebih terstandar, terdokumentasi, dan terintegrasi melalui satu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi terkait SIPD RI dilakukan melalui surat edaran, rapat internal, grup WhatsApp, sosialisasi, bimbingan teknis, YouTube, dan Zoom. Namun, komunikasi masih menghadapi kendala, terutama ketika terjadi perubahan fitur, keterlambatan informasi, atau antrean respons dari helpdesk pusat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi sudah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat agar informasi dapat diterima secara cepat, jelas, dan merata oleh seluruh pengguna.

Dari aspek sumber daya, operator inti umumnya telah mampu mengoperasikan SIPD RI, tetapi kemampuan pegawai masih bervariasi. Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami alur kerja dan fitur sistem. Selain itu, jumlah operator yang benar-benar kompeten masih terbatas, sehingga pekerjaan cenderung bergantung pada beberapa orang tertentu. Dari sisi sarana dan prasarana, komputer dan akses internet sudah tersedia, tetapi stabilitas jaringan dan gangguan server masih menjadi kendala dalam penggunaan SIPD RI. Dari aspek disposisi, pegawai pada dasarnya menerima penggunaan SIPD RI karena sistem ini membantu menertibkan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah. Namun, sebagian pegawai masih merasa terbebani oleh kompleksitas fitur, perubahan menu, serta gangguan teknis yang terjadi. Dengan demikian, sikap pelaksana terhadap SIPD RI dapat dikatakan cukup positif, tetapi tetap membutuhkan pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Dari aspek struktur birokrasi, implementasi SIPD RI telah didukung oleh pedoman, SOP, serta pembagian peran antara admin, operator, dan pejabat penanggung jawab. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa ketergantungan pada individu tertentu, belum meratanya pemahaman pegawai terhadap alur kerja sistem, serta evaluasi yang masih lebih berfokus pada kepatuhan administratif daripada pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD RI pada BKAD Kota Palangkaraya telah mendukung pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan keteraturan administrasi, standarisasi pelaporan, dan integrasi proses kerja. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi, pemerataan kompetensi sumber daya manusia, stabilitas sistem, adaptasi pengguna, serta pemanfaatan data SIPD RI dalam pengambilan keputusan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada implementasi SIPD RI dalam lingkup BKAD Kota Palangkaraya, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh kondisi implementasi SIPD

RI pada seluruh perangkat daerah. Padahal, penggunaan SIPD RI melibatkan banyak unit kerja dan perangkat daerah yang memiliki peran berbeda dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Kedua, data yang digunakan masih terbatas pada hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung yang tersedia. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih menekankan pada pengalaman, pandangan, dan temuan lapangan dari informan, bukan pada pengukuran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan sistem.

Ketiga, penelitian ini belum melakukan pengukuran secara teknis terhadap performa sistem, seperti kecepatan akses, frekuensi server down, durasi maintenance, atau jumlah kesalahan input yang terjadi dalam periode tertentu. Padahal, aspek teknis tersebut menjadi salah satu kendala dalam penggunaan SIPD RI, terutama ketika terjadi gangguan server, error, timeout, atau logout otomatis. Keempat, penelitian ini masih terbatas pada evaluasi berdasarkan empat aspek implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini belum membahas secara lebih mendalam aspek lain seperti keamanan data, kepuasan pengguna secara terukur, kualitas integrasi sistem, serta dampak SIPD RI terhadap kualitas pengambilan keputusan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, BKAD Kota Palangka Raya perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan SIPD RI secara berkala, tidak hanya kepada operator utama, tetapi juga kepada pegawai lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting agar pemahaman terhadap SIPD RI tidak hanya bergantung pada beberapa pegawai tertentu. Kedua, perlu dilakukan pemerataan kompetensi pegawai melalui pendampingan teknis yang lebih praktis dan berkelanjutan. Pendampingan dapat dilakukan melalui simulasi penggunaan SIPD RI dalam pekerjaan sehari-hari, seperti penyusunan RKA, revisi anggaran, penguncian data, koreksi data, dan pelaporan realisasi. Dengan demikian, pegawai dapat memahami alur kerja sistem secara lebih baik.

Ketiga, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur teknologi, terutama stabilitas jaringan internet, perangkat pendukung, serta koordinasi dengan helpdesk pusat ketika terjadi gangguan sistem. Selain itu, pembentukan tim teknis atau helpdesk lokal di tingkat daerah dapat menjadi langkah strategis untuk menangani kendala awal secara lebih cepat. Keempat, BKAD Kota Palangka Raya perlu mengurangi ketergantungan pada operator tertentu dengan menyiapkan operator cadangan pada setiap bidang atau unit kerja. Upaya ini penting agar proses input, validasi, dan pelaporan dalam SIPD RI tetap berjalan apabila operator utama berhalangan.

Kelima, evaluasi penggunaan SIPD RI sebaiknya tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan data sebagai dasar

pengambilan keputusan. Data dalam SIPD RI dapat digunakan untuk mendukung analisis keuangan, monitoring realisasi anggaran, dan penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih berbasis data. Keenam, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa OPD atau SKPD lain yang juga menggunakan SIPD RI. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan campuran agar hasil evaluasi lebih komprehensif, misalnya dengan mengukur tingkat kepuasan pengguna, frekuensi gangguan sistem, atau efektivitas waktu kerja sebelum dan sesudah penggunaan SIPD RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. B. N., Nurlitasari, S., & Pamastutiningtyas, T. S. (2025). Pengaruh kesiapan sumber daya manusia dalam penggunaan SIPD-RI terhadap efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. *YUME: Journal of Management*, 9(1), 1423–1431.
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Any, A., Sy, A., & Suryani, A. I. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 13(2), 474–486.
- Hasanah, M., & Djasuli, M. (2025). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.C), 156–164.
- Hasanah, W., Adelia, Musyrifah, W. A., & Rohmi, P. K. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 155–162. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.86>
- Hasanah, W., Adelia, Musyrifah, W. A., & Rohmi, P. K. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 155–162. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.86>
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Progres implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)*. Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- Mariana, L., & Pandoyo. (2024). Analisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*,

11(2), 123–130.

- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109–116. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Rafidah, M. D., & Muqorobin, M. M. (n.d.). Analisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*, 15–24.
- Rezkiaty, A. H., Alam, S., & Tenriwaru. (2024). Evaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2), 464–478.
- Saputra, Y., Kusuma, A. R., & Utomo, H. S. (2025). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang. *Jurnal Paradigma*, 14(1), 15–29.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Setiawan, D. A., & Anisykurlillah, R. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam memfasilitasi kerumahtanggaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)*, 4(1), 53–59.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Tumija, & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(2), 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>
- Tumija, & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Ogan Komering

Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokasi*, 5(2), 155–169.
<https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>

Widjaya, D., Fadli, S. D., & Prabowo, D. G. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam mendorong efektifitas perencanaan pembangunan daerah*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI.